



Peran Masyarakat dalam Desentralisasi Pendidikan

Regita Mutiara Rezani¹, Sari Maharani², Yantoro³

^{1,2,3}Universitas Jambi, Indonesia

E-mail: regitamutiara291@gmail.com, sarimaharani789@gmail.com, yantoro@unja.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2023-05-22 Revised: 2023-06-15 Published: 2023-07-01 Keywords: <i>Decentralization; Education; Public.</i>	Fundamental changes in education, among others, are related to management issues, which were originally centralized but are now being directed to decentralization. The decentralization of education is essentially an acknowledgment that the education process will not run well if everything is controlled from the center. Education is a process that involves interaction between input and environment. Decentralization means that those in control of education at the grassroots level will play a bigger role. This situation will encourage creativity and improvisation in implementing education. So that there will be continuous efforts to improve the quality of education. Education needs to be organized by building shared commitment, especially the government involving the community to participate in the decentralization of education.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2023-05-22 Direvisi: 2023-06-15 Dipublikasi: 2023-07-01 Kata kunci: <i>Desentralisasi; Pendidikan; Masyarakat.</i>	Perubahan mendasar dalam pendidikan antara lain terkait dengan masalah manajemen, yang semula sentralistik kini diarahkan menjadi desentralisasi. Desentralisasi pendidikan pada hakekatnya merupakan pengakuan bahwa proses pendidikan tidak akan berjalan dengan baik jika semuanya dikendalikan dari pusat. Pendidikan adalah proses yang melibatkan interaksi antara input dan lingkungan. Desentralisasi berarti pemegang kendali pendidikan di tingkat akar rumput akan memainkan peran yang lebih besar. Situasi ini akan mendorong kreativitas dan improvisasi dalam melaksanakan pendidikan. Sehingga akan ada upaya terus menerus untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan perlu diselenggarakan dengan membangun komitmen bersama, terutama pemerintah melibatkan masyarakat untuk berperan serta dalam desentralisasi Pendidikan.

I. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan sebuah proses untuk membantu kehidupan manusia dalam mengembangkan potensi dirinya sehingga mampu menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Pembangunan di bidang pendidikan seutuhnya merupakan sarana yang strategis dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM). Dengan demikian, sektor pendidikan perlu mendapat perhatian, penanganan, dan diprioritaskan yang intensif baik oleh pemerintah, masyarakat dan pengelola pendidikan. Pentingnya pendidikan bagi kehidupan umat manusia karena kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang menjalani kehidupan. Tanpa adanya pendidikan sangat tidak mungkin manusia dapat hidup berkembang sejalan dengan aspirasi (cita-cita) untuk mencapai suatu tujuan, sejahtera dan kebahagiaan sebagai pandangan hidup mereka.

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang sedang berkembang terutama di bidang pendidikan, saat ini pendidikan merupakan kebutuhan mutlak yang harus dikembangkan sejalan dengan tuntutan pembangunan secara tahap demi tahap. Untuk membangun suatu pendidikan yang di-

kelola dengan efektif, teratur, tertib dan efisien akan mampu mempermudah jalannya proses pembelajaran pembudayaan bangsa yang berdasarkan pokok-pokok kesejahteraan umum dan untuk dapat mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan dengan tujuan. Pendidikan sebagai salah satu sektor yang paling sentral dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia pada suatu bangsa, dijadikan sesuatu yang sangat utama untuk berfungsi semaksimal mungkin dalam upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yang bertakwa, berakhlak mulia, berbudi pekerti yang luhur, dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber motivasi kehidupan dalam segala bidang (Ihsan, 2005:2- 4).

Berbicara masalah transformasi sebuah sistem pendidikan secara komprehensif, semestinya masalah apa yang sebenarnya sedang dihadapi. Untuk memecahkan suatu masalah mengenai sistem Pendidikan yang kemudian dijabarkan dalam politik suatu pendidikan bangsa adalah menyelenggarakan desentralisasi pendidikan. Jika dilihat berita dari media masa, sudah cukup lama bangsa Indonesia telah

mencapai suatu kemerdekaan politik dan pergantian pemimpin atau kekuasaan sudah kerap dilakukan, tetapi secara kenyataan justru yang dirasakan makin tertinggalnya kita dari cita-cita dalam dasar negara. Hal tersebut tidak hanya sekedar dipelajari, dilihat sebagai suatu tantangan yang perlu direspon, tetapi lebih dari itu, ini merupakan suatu ancaman bangsa kita yang memerlukan paradigma berfikir yang lebih siap untuk mengarungi pergerakan suatu budaya dalam kehidupan bangsa, mengatasi berbagai dampak eksploitatif bagi mempertahankan harkat dan martabat kemanusiaan bangsa kita (Widja, 2009: 51-53).

Berbagai perubahan mendasar yang terjadi antara lain sangat berkaitan dengan permasalahan mengenai manajemen pendidikan, yang pada awalnya sentralisasi kini diarahkan menjadi desentralisasi. Berbagai usaha yang dilakukan pemerintah tiada lain bertujuan untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia yang selalu dilanda berbagai permasalahan dari waktu ke waktu. Sehingga kualitas sektor pendidikan di Indonesia sampai saat ini masih tergolong rendah, tidak ada kemajuan dan mengalami suatu kemunduran berdampak pada SDM yang sulit untuk bersaing dengan SDM dari negara-negara lain. Sistem manajemen pendidikan yang sentralistik sulit untuk berkembang dimana pemerintah pusat yang berwenang dalam mengatur bidang pendidikan. Hal tersebut menimbulkan dampak yang tidak baik bagi pendidikan, karena tidak mepedulikan suatu keragaman sesuai dengan realita di lapangan baik dari segi ekonomi, budaya masyarakat Indonesia di berbagai daerah yang berbeda-beda, dan mengabaikan proses pembelajaran yang efektif dan tidak mampu menjangkau seluruh ranah dan potensi anak didik. Ketika perubahan kebijakan otonomi daerah itu terjadi, khususnya dalam otonomi pendidikan, maka terjadinya suatu dekonsentrasi kewenangan dari tingkat pusat hingga semuanya kembali ke pihak sekolah (Kompri, 2015: 128).

Desentralisasi pendidikan pada dasarnya merupakan proses manajemen pendidikan tidak akan berjalan dengan benar jika seluruhnya dikontrol dari pusat. Peran yang lebih besar adalah pelaku pendidikan di tingkat bawah. Keadaan ini akan menciptakan suatu kreativitas-kreativitas yang muncul dalam proses pelaksanaan pendidikan, sehingga akan terdapat usaha sadar yang terus menerus memajukan kualitas pendidikan di Indonesia. (Kompri, 2015: 128-129).

Menurut Suryadi, titik awal dari terpuruknya sistem pendidikan kita yaitu pada saat keluarnya Impres SDN No. 10/1973. Pemerintah telah mengambil alih kepemilikan sekolah yang pada mulanya sekolah milik masyarakat menjadi sekolah milik pemerintah dan dikelola sepenuhnya secara sentralistik (pusat). Sehingga dampak dari itu, rasa memiliki masyarakat terhadap sekolah menjadi pudar bahkan akhirnya tidak mepedulikan. Sebelumnya masyarakat ikut serta bertanggung jawab, dengan adanya perubahan itu menjadikan masyarakat hanya sekedar berpartisipasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pendidikan (Kompri, 2015: 141).

Masalah pada pembangunan pendidikan di Indonesia, jika dilihat dari sudut pandang faktual yang terjadi bahwa pendidikan kita belum memberikan dampak signifikan bagi kehidupan bangsa dan belum adanya kemajuan kualitas pendidikan yang lebih baik. Kredibilitas bangsa Indonesia di mata masyarakat dunia jika dilihat dari hasil survei dan riset yang dilakukan lembaga dunia menggambarkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia tidak semakin maju, tetapi justru mengalami suatu kemunduran dalam beberapa tahun terakhir. Permasalahan di lapangan pada manajemen pendidikan merupakan salah satu faktor yang menekankan kepada pemerintah dan juga bukan kepada seluruh stakeholders pendidikan seperti masyarakat, orang tua, guru, dan siswa itu sendiri yang sebenarnya merupakan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan (Uno, 2016: 7-8).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dimana data dan hasil dipaparkan dalam bentuk penjelasan deskriptif (Sugiono, 2016). Sedangkan untuk teknik Pengumpulan data dilakukan ada tiga metode yaitu observasi, wawancara dan studi kepustakaan dan menggunakan teknik analisis data model interaktif. Jika data yang terkumpul masih kurang memadai maka peneliti melakukan teknik pemeriksaan data agar penelitian tidak bias. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan permasalahan-permasalahan pendidikan yang dialami bangsa Indonesia, masyarakat hanya cenderung berfikir tentang dua hal praktis pedagogik yaitu dimensi teknis dan dimensi normatif. Pertama, menyangkut berbagai strategi, memfungsikan pendidikan dalam masyarakat dan juga proses tindakan untuk

mengembangkan secara optimal dalam tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan secara. Kedua, berusaha untuk merumuskan nilai-nilai sebagai landasan pendidikan yang meliputi berbagai kebijakan untuk mewujudkan cita-cita bersama baik dalam skala makro maupun skala mikro (keluarga/ masyarakat) (Widja, 2009: 1).

1. Kebijakan Desentralisasi Pendidikan

Menurut Kompri (2015: 138) menjelaskan bahwa beberapa konsep yang dikemukakan tentang desentralisasi oleh para ahli sebagai antara lain sebagai berikut:

- a) Desentralisasi merupakan bentuk penyerahan kewenangan kepada pemerintah yang lebih rendah dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, baik yang menyangkut di bidang legislative, judikatif atau administrasi (*encyclopedia of the social sciences*).
- b) Soejito berpendapat bahwa desentralisasi merupakan suatu sistem yang digunakan untuk bidang pemerintahan merupakan kebalikan dari sentralisasi, karena sebagian kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pihak lain untuk terlaksananya sistem pendidikan.
- c) Desentralisasi tidak hanya melimpahkan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah yang lebih rendah, tetapi juga pelimpahan dari beberapa kewenangan pemerintahan ke pihak swasta yang dalam bentuk privatisasi.
- d) Desentralisasi merupakan pertimbangan kepentingan sendiri mengambil keputusan pengaturan pemerintah, serta struktur wewenang yang terjadi dan sebagai pengakuan atau penyerahan wewenang oleh badan-badan umum yang lebih rendah untuk secara mandiri
- e) Desentralisasi pendidikan pada dasarnya mempunyai makna bahwa tanggung jawab pendidikan dari pemerintah pusat sebagian diserahkan kepada pemerintah daerah agar menjadi urusan rumah tangga. Sehingga wewenang tersebut menjadikan tanggung jawab pemerintah daerah dan melalui proses desentralisasi urusan-urusan pemerintahan yang semula termasuk wewenang.
- f) Desentralisasi ataupun mendesentralisasi pemerintahan bisa berarti tanggung jawab bersama antara institusi-institusi pemerintah pusat, regional, maupun tingkat lokal. Desentralisasi pendidikan berarti merestrukturisasikan atau mengatur kembali kekuasaan sehingga terdapat suatu sistem.

Meningkatkan kualitas pendidikan dengan keefektifan yang menyeluruh, sistem pemerintahan, kapasitas tingkat sub dan juga meningkatkan otoritas.

Melaksanakan desentralisasi pendidikan secara yang serentak di seluruh Indonesia nampaknya mengalami berbagai kendala yang begitu rumit, karena terdapat sejumlah permasalahan dan kesulitan yang perlu diatasi bersama. Menurut Hasbullah (terdapat dalam Kompri, 2015: 142) berbagai permasalahan yang berkaitan dengan substansi manajemen pendidikan dan undang-undang dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Masalah Kurikulum

a) Kurikulum bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi lembaganya seperti seluruh program, fasilitas dan juga kegiatan suatu lembaga pendidikan atau pelatihan-pelatihan. Oleh sebab itu, melaksanakan kurikulum untuk menunjang keberhasilan suatu lembaga pendidikan harus didukung hal-hal berikut ini:

- 1) Tersedianya tenaga kependidikan (guru) yang berkompeten
- 2) Menunjang tersedianya fasilitas sarana prasarana dalam proses pembelajaran yang memadai dan menyenangkan
- 3) Tersedianya tenaga penunjang pendidikan, seperti tenaga administrasi, pembimbing, pustakawan, laporan sebagai fasilitas bantu untuk proses belajar mengajar.
- 4) Tersedianya dana yang cukup memadai
- 5) Manajemen efisien dan efektif
- 6) Terpeliharanya sikap dan juga nilai-nilai religious, moral, rasa kebangsaan merupakan budaya yang menunjang pembentukan karakter bangsa.
- 7) Pemimpinan pendidikan yang visioner, akuntabel, dan transparan.

b) Masalah Sumber Daya Manusia dalam melakukan implementasi desentralisasi pendidikan dibutuhkan pilar yang paling utama untuk memajukan suatu pendidikan yaitu sumber daya manusia yang memadai. Kesiapan bidang SDM ini mengalami suatu kekhawatiran, diantaranya belum terpenuhinya lapangan pekerjaan dengan kemampuan sumber daya yang telah ada. Bagaimanapun SDM yang kurang profesional akan merugikan dan mengalami suatu hambatan pelaksanaan pada sistem pendidikan.

Penataan sumber daya manusia yang tidak sesuai juga dengan background pendidikan dan bidangnya memberikan dampak pelaksanaan pendidikan yang tidak profesional. Banyak tenaga pendidikan yang latar belakangnya merupakan lulusan sarjana pendidikan (S.Pd), tidak relevan ditempatkan di dunia kerja yang ditekuninya. Masalah Dana, Sarana, dan Prasarana Dana masyarakat yang selama ini telah digunakan untuk pembangunan pendidikan belum secara optimal teralokasikan sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan sebenarnya telah mengamanatkan betapa pentingnya alokasi anggaran dana pembangunan pendidikan dan untuk pembiayaan pendidikan. Daerah menjadi semakin tidak berdaya membiayai penyelenggaraan pendidikan karena terserapnya masyarakat terpusat. Sarana dan prasarana pembangunan sector pendidikan sangat tergantung pandangannya dari pemerintah pusat.

2. Masalah Organisasi Kelembagaan

Proses yang cukup rumit serta menjadi suatu kendala terletak pada poses desentralisasi kelembagaan pendidikan. Hal ini sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Soewartoyo, dkk. Karena beberapa faktor antara lain:

- a) Pendidikan akan menciptakan suatu sistem pendidikan dengan kebijakan-kebijakan yang faktual karena adanya desentralisasi kelembagaan pendidikan.
- b) Desentralisasi kelembagaan pendidikan harus mampu membentuk sumber daya yang berkualitas dan sekaligus memanfaatkannya untuk tujuan pendidikan.
- c) Melatih tenaga kependidikan dan tenaga pengelola tingkat lapangan yang profesional melalui desentralisasi kelembagaan pendidikan.
- d) Desentralisasi kelembagaan pendidikan harus mampu menyusun kurikulum yang tepat untuk menunjang suatu proses pendidikan formal.
- e) Harus mampu mengelola sistem pendidikan yang didasari pada kehidupan sosial budaya melalui Desentralisasi kelembagaan.

2. Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Desentralisasi Pendidikan

a) Peranan Keluarga dalam Pendidikan

Tempat belajar pertama bagi anak-anak adalah rumah. Seorang ibu dan ayah merupakan guru pertama dan guru yang utama bagi anak-anak. Di lingkungan keluarga, entah adanya ayah, ibunya, kakek, nenek, paman, bibinya dan para tetangganya, anak akan belajar apapun dari personil yang ada di rumahnya. Tetap yang menjadi pengajar utama adalah orang tua atau ayah dan ibunya sendiri dari sekian banyak personil yang ada di lingkungan rumahnya. Pendidikan anak dalam lingkungan keluarga merupakan untuk menumbuhkan rasa kasih sayang, pengertian, bagaimana berkomunikasi yang baik, rasa percaya diri, berbudi pekerti dan lain sebagainya merupakan pendidikan yang harus dilakukan oleh orang tua melalui contoh perilaku kehidupannya. Seorang anak yang dibesarkan dengan cara mendidik dan dirawat oleh orang tuanya dengan rasa kasih sayang, walaupun disekolahkan hingga jenjang yang tinggi pun merupakan suatu bekal dari tumahnya sebagai anak yang bijaksana akan mengerti tentang hidup harmonis antar sesama manusia, dengan lingkungan alam maupun harmonis dengan Tuhan untuk memperjuangkan tanggung jawabnya sebagai anak. Kita pasti menginginkan yang terbaik bagi anak sebagai orang tua yang mendidik (Damayanti, 2014: 167-168).

Pembentukan nilai-nilai pendidikan karakter anak di lingkungan keluarga akan berpengaruh kehidupan anak di masa depannya. Oleh sebab itu, semua nilai yang dianut keluarga tidak musnah, maka pendidikan keluarga harus menularkan apa yang telah dimilikinya untuk menurunkan nilai-nilai pendidikan budi pekerti kepada generasi berikutnya. Melalui pendidikan adalah jalan yang harus dilakukan sebagai proses memanusiakan manusia yang utuh. Maka dari itu, pendidikan di dalam keluarga mengajarkan anak untuk bisa hidup di lingkungan sekolah dalam sikap-sikap yang dimilikinya, pergaulan hidup, dan mengajarkan bagaimana cara tingkah laku dalam hidup bermasyarakat. Keluarga merupakan bagian dari masyarakat maka ikut serta bertanggung jawab atas pembentukan pendidikan karakter untuk generasi muda. Pengembangan nilai kebudayaan

karena keberadaan keluarga yang merupakan dasar pendidikan bagi anak.

Sebagian besar waktu seorang anak berada di lingkungan keluarga dibandingkan di sekolah maupun di masyarakat, sehingga proses pendidikan secara sengaja maupun tidak sengaja telah banyak terjadi dalam lingkungan keluarga. Namun secara kenyataan, ada saja dalam lingkungan keluarga tertentu proses sosialisasi tidak harmonis sampai terjadi dalam keluarga, hal tersebut membuat anak mencari jati diri di luar keluarganya terutama pada orang lain yang menyebabkan nilai kebudayaan menjadi terhambat. Keluarga berhak dan wajib untuk melakukan kegiatan pendidikan terhadap anak-anaknya, dilanjutkan dengan pendidikan di masyarakat melalui sosialisasi. Seandainya dalam temuan ketidakmampuan lingkungan keluarga dalam mendidik anaknya maka dalam masyarakat juga ditemukan suatu penyimpangan sosialisasi. Arah pendidikan dalam keluarga dengan sosialisasi pada masyarakat, secara normatif dapat terjadinya kesamaan dan juga kesejajaran (Uno, 2016: 254).

Berpengaruhnya suatu pertumbuhan dan berkembangnya watak, moral, budi pekerti dan kepribadian tiap-tiap manusia karena bentuk dan isi serta cara-cara pendidikan di dalam keluarga berhasil dilaksanakan. Pendidikan yang didapatkan oleh anak dalam keluarga inilah akan sebagai dasar yang digunakan untuk mengikuti pendidikan selanjutnya di sekolah. Menciptakan keharmonisan di lingkungan keluarga agar anak betah tinggal di rumahnya sebenarnya bertujuan untuk pembentukan watak, budi pekerti, kesosialan seperti tolong menolong, menjaga kebersihan rumah, menjaga kesehatan, keterampilan, dan ketentraman rumah tangga merupakan tanggung jawab orang tua dalam melaksanakan tugas keluarga terhadap pendidikan. Peranan keluarga sebagai lembaga pendidikan semakin tampak dan penting untuk mewujudkan cita-cita pelaksanaan pendidikan. Peranan orang tua dalam penanaman sikap nilai hidup, pengembangan minat yang dimiliki anak serta pembinaan bakat dan juga kepribadian akan membentuk jiwa anak yang is dengan menerapkan nilai pancasila dan menjadikan karakter anak yang ber-

takwa, beriman juga terhadap nilai-nilai keagamaan serta nilai-nilai kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa (Ihsan, 2005:58).

Jika dilihat dari Undang-Undang SISDIKNAS (2014: 9), hak dan kewajiban sebagai orang tua untuk memberikan pendidikan kepada anaknya terdapat dalam pasal 7 UU RI No. 20 tahun 2003 yang berbunyi:

- 1) Orang tua berhak untuk berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi mengenai perkembangan pendidikan anaknya.
- 2) Dari anak usia wajib belajar, orang tua berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

Berdasarkan dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peran keluarga dalam penyelenggaraan desentralisasi pendidikan sangat penting karena tanggung jawab pendidikan juga tanggung jawab keluarga. Melaksanakan pendidikan pada dasarnya berawal dari pendidikan di lingkungan keluarga terutama untuk pembentukan pendidikan karakter, menciptakan manusia yang bermoral, berbudi pekerti yang luhur, beriman, berakhlak mulia, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b) Peranan Masyarakat dalam Pendidikan

Lembaga pendidikan yang ketiga setelah pendidikan di lingkungan keluarga dan pendidikan di sekolah adalah pendidikan di masyarakat. Diselenggarakannya lembaga pendidikan oleh masyarakat salah satunya adalah unsur pelaksanaan asas pendidikan seumur hidup. Pendidikan masyarakat lebih menonjolkan pada partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan setiap kegiatan pada lembaga dan proses pemerintahan. Menurut Gavenha dan Valderman menegaskan bahwa pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat dan partisipasi masyarakat telah berpindahnya konsep partisipasi menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijakan demi kemajuan suatu pendidikan (Kompri, 2015: 150-151).

Untuk memajukan suatu pendidikan dengan keikutsertaan peranan masyarakat terdapat dalam pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003. Pasal 8

berbunyi: masyarakat berhak berperan serta dalam program pendidikan dengan pelaksanaan, perencanaan, pengawasan, dan evaluasi. Sedangkan pasal 9 berbunyi: dalam penyelenggaraan pendidikan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya (Undang-Undang SISDIKNAS, 2014: 9).

Pada pasal 54 UU RI No. 20 tahun 2003 dalam Undang-Undang SISDIKNAS (2014: 35) dijelaskan juga peran serta masyarakat dalam pendidikan secara umum antara lain berbunyi:

- 1) Masyarakat berperan dalam pendidikan meliputi peran serta baik kelompok warga, tiap individu, keluarga, organisasi masyarakat maupun pengusaha untuk diselenggarakan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- 2) Masyarakat ikut serta berperan sebagai pelaksanaan pendidikan, sumber kegiatan pendidikan, dan pengguna hasil pendidikan.
- 3) Peran serta masyarakat untuk memajukan suatu pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut juga dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 55 UU RI No. 20 tahun 2003 dalam Undang-Undang SISDIKNAS (2014: 35-36) tentang Pendidikan Berbasis Masyarakat, pasal tersebut berbunyi: (1) Masyarakat berhak untuk menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat dalam pendidikan nonformal maupun formal sesuai dengan kekhasan agama, kondisi lingkungan sosial dan budaya untuk kepentingan masyarakat. (2) penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan kurikulum, evaluasi pendidikan, manajemen pendidikan dan pendanaannya sesuai dengan standar pendidikan. (3) Penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari dana terutama dari masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak penyelenggara maupun sumber lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Pendidikan berbasis masyarakat sebagai lembaga pendidikan dapat memperoleh bantuan dari pemerintah atau pemerintah daerah seperti teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata. (5) Ketentuan peran serta masyarakat sebagai-

mana yang dimaksud telah diatur dalam ayat 1, 2, 3 dan 4 maka diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut Kompri (2015: 151) pengembangan mengenai konsep dan asumsi dasar untuk meluaskan gagasan dan praktik tentang partisipasi masyarakat dalam pendidikan meliputi:

- 1) Melekat pada warga sebagaimana hak politik lainnya merupakan partisipasi hak politik.
- 2) Menutupi kegagalan demokrasi perwakilan dapat untuk partisipasi secara langsung dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan politik di lembaga-lembaga formal.
- 3) Partisipasi masyarakat dilakukan secara langsung dalam pengambilan keputusan publik dapat meningkatkan partisipasi lebih bermakna.
- 4) Partisipasi bukan hal yang insidental, namun dilakukan secara sistematis.
- 5) Diterimanya desentralisasi sebagai instrument yang juga mendorong tata pemerintahan yang baik (good governance).
- 6) Partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan dan juga lembaga pemerintah.

Berdasarkan dari lingkungan pendidikan, masyarakat disebut dengan lingkungan pendidikan non formal yang berencana kepada seluruh anggotanya tetapi tidak sistematis dan memberikan pendidikan secara sengaja. Masyarakat secara fungsional adalah menerima semua warga yang pluralistic untuk mencapai kesejahteraan sosial para anggotanya dengan mampu mengarahkan menjadi anggota masyarakat yang baik untuk kesejahteraan mental spiritual dan fisikal (kesejahteraan lahir batin). Secara fungsional struktural, pendidikan yang dilakukan masyarakat ikut berperan aktif melalui berbagai pengalaman yang berulang-ulang dalam terbentuknya sikap sosial para anggotanya. Pengalaman yang beraneka ragam, maka sikap sosial para anggota masyarakatpun juga beraneka ragam (Kompri, 2015: 152).

Ihsan (2005: 58-61) berpendapat bahwa peranan masyarakat tersebut dilaksanakan

melalui jalur-jalur tertentu untuk meningkatkan pendidikan diantaranya adalah:

1) Peranan Perguruan Swasta

Pertumbuhan dan kemampuan perlu dikembangkan serta ditingkatkan berdasarkan pola pendidikan yang matang dengan tetap mengkedepankan ciri khas perguruan yang bersangkutan karena perguruan swasta mempunyai tanggung jawab dan peranan yang sangat penting untuk ikut serta melaksanakan pendidikan. Usaha-usaha yang dilakukan masyarakat secara langsung mengelola dan menyelenggarakan pendidikan formal melalui perguruan swasta.

2) Peranan Dunia Usaha

Dunia usaha mempunyai kaitan erat dengan unsur-unsur kehidupan masyarakat lainnya karena dunia usaha juga bagian dari masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan. Hubungan pendidikan dengan dunia usaha dilihat dari dua segi yaitu:

- a. Dunia usaha memanfaatkan dan juga mengambil dari hasil pendidikan yang berupa lulusan tenaga pekerja, dalam arti dunia usaha sebagai konsumen pendidikan.
- b. Dunia usaha sebagai pengembangan pelaksana dalam penyelenggaraan sistem pendidikan.

3) Peranan Kelompok Profesi

Dalam sistem pendidikan, Peranan kelompok profesi antara lain:

- a. Merencanakan dan menyelenggarakan latihan keahlian, bakat dan juga keterampilan.
- b. Menguji kualitas keterampilan dan keahlian tersebut untuk menjamin mutu pendidikan.
- c. Menyediakan tenaga-tenaga pendidikan untuk berbagai jenis pendidikan (pendidikan kemasyarakatan dan pendidikan khusus).

4) Peranan Lembaga Swasta Lainnya

Menyelenggarakan pendidikan baik kegiatan-kegiatan sosial, keagamaan, kebudayaan, penelitian, keterampilan dan juga keahlian merupakan peran lembaga-lembaga swasta yang ikut serta mengelola. Peranan lembaga swasta diharapkan juga mampu melaksanakan kegiatan pendidikan kemasyarakatan melalui kegiatan-kegiatan pendidikan yang mempunyai sikap sosial.

Berdasarkan dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa peranan masyarakat terhadap desentralisasi pendidikan adalah menekankan pada partisipasi langsung warga dalam mengambil keputusan pada lembaga dan juga proses pemerintahan. Memajukan suatu pendidikan di masyarakat untuk tercapainya kesejahteraan, sikap sosial para anggotanya yaitu kesejahteraan mental spiritual dan fisikal atau kesejahteraan lahir batin.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Desentralisasi pendidikan pada hakekatnya merupakan pengakuan bahwa proses pendidikan tidak akan berjalan dengan baik jika seluruhnya dikontrol dari pusat. Pendidikan merupakan suatu proses dimana melibatkan interaksi antara input dengan lingkungan. Karena interaksi yang ada dan lingkungan memiliki karakteristik yang berbeda dari satu tempat dengan tempat lain, maka keseragaman secara menyeluruh yang dikumandangkan dari pusat tidak pernah menghasilkan proses pendidikan yang maksimal. Dengan desentralisasi berarti pemegang kendali pendidikan di tingkat bawah akan mempunyai peran yang lebih besar. Hal tersebut akan meningkatkan suatu kreatifitas serta improvisasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
2. Partisipasi masyarakat dalam desentralisasi pendidikan untuk menekankan pada "partisipasi" langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Secara fungsional masyarakat menerima semua anggotanya yang pluralistic (majemuk) itu dan mengarahkan menjadi anggota masyarakat yang baik untuk tercapainya kesejahteraan sosial para anggotanya yaitu kesejahteraan mental spiritual dan fisikal atau kesejahteraan lahir batin. Secara fungsional struktural, masyarakat ikut mempengaruhi terbentuknya sikap sosial para anggotanya, melalui berbagai pengalaman yang berulang-ulang.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya

adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Peran Masyarakat dalam Desentralisasi Pendidikan.

DAFTAR RUJUKAN

- Damayanti, D. (2014). Panduan Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah Yogyakarta: Araska
- Kompri. (2015). Manajemen Pendidikan 1. Bandung: Alfabeta.
- Ihsan, F. (2005). Dasar-Dasar Kependidikan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarsana, I. K. (2016). PEMIKIRAN TOKOH PENDIDIKAN DALAM BUKU LIFELONG LEARNING: POLICIES, PRACTICES, AND PROGRAMS (Perspektif Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia). Jurnal Penjaminan Mutu, (2016), 44-53.
- Uno, H. B. (2016). Landasan Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widja, I G. (2009). Pendidikan Sebagai Ideologi Budaya. Denpasar: Program Magister dan Doktor Kajian Budaya UNUD.
- Wisarja, I. K., & Sudarsana, I. K. (2017). Praksis Pendidikan Menurut Habermas (Rekonstruksi Teori Evolusi Sosial Melalui Proses Belajar Masyarakat). Indonesian Journal of Educational Research, 2(1), 18-26.
- Wisarja, I. K., & Sudarsana, I. K. (2017). REFLEKSI KRITIS IDEOLOGI PENDIDIKAN KONSERVATISME DAN LIBERALISME MENUJU PARADIGMA BARU PENDIDIKAN. Journal of Education Research and Evaluation, 1(4), 283-291.
- Yathasya, D., Romadonia, M., Ningsih, I., & Zulkhi, M. D. (2022). Perbandingan Karakter Cinta Tanah Air dan Cinta Damai dalam Pembelajaran IPS. Journal of Basic Education Research, 3(3), 86-90.
- Zulkhi, M. D., Tiwandani, N. A., Siregar, I. H., & Saputri, L. (2023). Perwujudan Entitas dan Identitas Bangsa Indonesia dalam Pembelajaran Abad 21 melalui Penerapan Profil Pelajar Pancasila. Journal on Teacher Education, 4(3), 161-171.